

## **DISEMINASI PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA BUMDES DAN UMKM DI KECAMATAN GEGERBITUNG**

**Nurni Arrina Lestari, Muhammad Khairul Amal, Leonita Siwiyanti**

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
*nurniarrinalestari@email.ac.id.*

### **Abstract**

Village development is a priority in national development, one way is by building BUMDes and MSMEs to develop village potential with the aim of improving community welfare. Government assistance in the form of village funds is provided to achieve this goal. However, as time goes by, many BUMDes and MSMEs are unable to develop even to the point of stalling. The method of implementing this community service activity is carried out with the stages of observation, training, and mentoring. Based on observations, it was found that some BUMDes managers did not develop businesses based on village potential and there was still a lack of knowledge of village managers about BUMDes. Furthermore, at the training stage, it resulted in an increase of 57% in the understanding of BUMDes and MSME managers. However, in terms of assistance, it is very necessary to have support from regional leaders so that further training needs to be improved, especially in increasing human resources so that good regeneration of BUMDes and MSMEs management is needed in the Gegerbitung District, Sukabumi Regency.

*Keywords: BUMDes, UMKM, Capacity Building.*

### **Abstrak**

Pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, salah satu caranya dengan membangun BUMDes dan UMKM untuk mengembangkan potensi desa dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan pemerintah berupa dana desa diberikan agar tujuan tersebut tercapai. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, banyak BUMDes dan UMKM yang tidak mampu berkembang bahkan hingga mangkrak. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tahap observasi, pelatihan, dan pendampingan. Berdasarkan observasi ditemukan bahwa beberapa pengelola BUMDes tidak mengembangkan usaha berdasarkan potensi desa dan masih minimnya pengetahuan pengelola desa terhadap BUMDes. Selanjutnya pada tahap pelatihan menghasilkan peningkatan sebesar 57% pada pemahaman pengelola BUMDes dan UMKM. Adapun kegiatan pendampingan ini sangat diperlukan dorongan dan dukungan berbagai pihak, terutama jajaran pemerintahan daerah, dengan peningkatan pelatihan selanjutnya terkait sumber daya manusia (SDM) guna munculnya pengurus BUMDes dan UMKM yang baik di wilayah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi.

*Kata kunci: BUMDes, UMKM, Peningkatan Kapasitas.*

## PENDAHULUAN

Sampai saat ini belum dapat diprediksi kapan akan berakhirnya masa pandemic Covid-19 akan berakhir di Indonesia, wabah yang masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020 telah memporakporandakan seluruh aspek kehidupan di negeri ini. Sektor ekonomi menjadi salah satu yang terkena dampak yang secara nyata dapat dirasakan, meningkatnya pengangguran, sulitnya memasarkan barang dan jasa, banyaknya usaha yang ditutup menjadi indikator sederhana dampak covid-19 terhadap perekonomian. Tidak hanya di perkotaan, sebanyak 70,53% di sektor informal yang ada di wilayah pedesaan terdapat kondisi yang menurun dalam aspek pendapatan, termasuk di dalamnya pendapatan. (Pratiwi & Novianty, 2020; Zakariya, 2020a). Selain itu, biaya perdagangan semakin meningkat produktivitas dari pekerja serta hasil produk daripada pertanian ikut menurun, yang diakibatkan covid-19. (Basit, 2020).

Dalam mensukseskan program pemerintah, dalam konteks peningkatan ekonomi masyarakat dan Desa sendiri, serta peningkatan pendapatan asli desa termasuk di dalamnya optimasi pengelolaan potensi desa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) hadir dalam menjadi daya ungkit pertumbuhan serta pemerataan ekonomi. Harapannya BUMDes juga mampu memberikan sumbangsih dalam penurunan angka kemiskinan masyarakat, namun faktanya seluruh dunia usaha dan industry termasuk di dalamnya BUMDes tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat wabah Covid-19 khususnya yang beroperasi pada sektor jasa. (Fitria, 2020; Karta Raharja Ucu, 2020).

Sejak diluncurkan UU Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa, saat ini jumlah BUMDes sekitar 45.549 yang

tersebar di seluruh Indonesia, bahkan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tercatat 61% desa diseluruh Indonesia telah memiliki BUMDes. Namun sampai tahun 2019 tercatat 37.286 BUMDes yang aktif pada tahun 2019, bahkan dimasa pandemi Covid-19 mulai Maret hingga Mei jumlah BUMDes aktif sebanyak 10.629 BUMDes (Ahmad Zuliansyah, Anas Malik, 2020; Hasan, 2020)

Pasal 90 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban mengembangkan potensi desa dan memperkuat perekonomian desa melalui kegiatan ekonomi dengan pendirian dan pengembangan BUMDes (Tini & Yuliastina, 2021). Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan istilah BUMDes itu sendiri merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya (Anwar et al., 2019). Dukungan diberikan oleh pemerintah dengan mengucurkan anggaran nyaris sebesar Rp330 triliun untuk Program Dana Desa dalam lima tahun terakhir. Namun, uang sebanyak itu rupanya belum dimanfaatkan secara optimal, terutama oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bahkan tercatat sebanyak 2.188 BUMDes yang mangkrak atau tidak beroperasi (Zakariya, 2020b).

Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat memiliki 381 Desa, dari tahun 2017 sampai 2019 sebesar 52.3 miliar penyertaan modal dana desa kepada BUMDes yang tersebar di 95% desa, karena tidak seluruh mendapatkan penyertaan modal (Sukabumiupdate, 2020), namun faktanya hanya 10

persen saja BUMDes yang berjalan dengan baik. Perencanaan menjadi permasalahan utama yang dihadapi pengelola BUMDes dalam menjalankan usahanya, diakui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi bahwa awal pendirian BUMDes Sebagian besar hanya ikut-ikutan (Sukabumiupdate, 2020). Selain itu pembinaan peningkatan kapabilitas pengelolaan BUMDes jarang sekali dilakukan.

Ada beberapa hal yang membuat BUMDes di banyak desa tak juga mampu bergerak menjadi mesin pendorong kesejahteraan warga. Beberapa hal itu antara lain: 1) Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih sangat kurang. 2) Pengelola BUMDes yang bekerja tidak sesuai kaidah pendirian BUMDes, 3) Pengelolaan tata usaha BUMDes yang kurang baik, 4) BUMDes dikelola oleh orang yang tidak kompeten. Kecamatan Gegerbitung terdiri dari 7 desa/kelurahan, yaitu Buniwangi, Caringin, Ciengang, Cijurey, Gegerbitung, Karangjaya, dan Sukamanah (Kecamatan Gegerbitung, 2021). Tidak ingin BUMDes dan UMKM yang berada di kecamatan tersebut mangkrak, sehingga dijalin kerjasama antara pihak Kecamatan Gegerbitung dengan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) untuk mengadakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan BUMDes dan UMKM. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan BUMDes dan UMKM tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan para pengelolanya dalam menjalankan kegiatan operasional (Khanida et al., 2020)

## METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat bagi pengelola BUMDes dan UMKM di wilayah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang yang berasal dari 7 desa, meliputi Buniwangi, Caringin, Ciengang, Cijurey, Gegerbitung, Karangjaya, dan Sukamanah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagaimana tersaji dalam gambar 1 berikut :



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Penjelasan dari setiap tahapan kegiatan tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Observasi  
Kegiatan diawali dengan melakukan pengamatan langsung ke Kecamatan Gegerbitung dengan mewawancarai para aparat desa, pengelola BUMDes dan pengelola UMKM.
2. Pelatihan  
Pada tahap ini diberikan edukasi kepada pengelola BUMDes dan UMKM di wilayah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. Pelatihan terfokus pada 4 aspek, meliputi 1) Penatausahaan BUMDes, 2) Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, 3) Manajemen BUMDes, dan 4) Perencanaan Pengelolaan BUMDes. Hasil dari kegiatan pelatihan ini dilakukan monev pemahaman dari para peserta dengan memberikan

soal pre test dan post, untuk mengetahui tingkat pemahaman para peserta sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan pelatihan tersebut.

3. Pendampingan  
Setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan kepada para pengurus BUMDes, maka tahap selanjutnya dengan melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dan UMKM di wilayah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dengan tujuan materi yang sudah diberikan pada saat pelatihan dapat diterapkan secara langsung di lapangan dengan di damping oleh Tim PkM UMMI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tahap Observasi

Tahapan pertama yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan observasi langsung ke lokasi pengabdian. Tahap observasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 dan bertempat di BUMDes Mandiri Desa Caringin. Observasi dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap aparat desa, pengelola BUMDes, dan pengelola UMKM.

Pada tahap observasi ini, tidak ditemukan kendala yang berarti sebab adanya sinergitas dari semua pihak terkait. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa BUMDes menjalankan usahanya belum didasarkan pada potensi wilayah yang ada dan kurangnya pemahaman pengelola BUMDes, menjadi pemicu utama belum maksimalnya perkembangan BUMDes dan UMKM di Kecamatan Gegerbitung.

Pada tahap ini juga disepakati jadwal pelatihan serta pendampingan pengelola BUMDes dan pengelola UMKM.



Gambar 2. Observasi kepada pengelola BUMDes dan UMKM

### 2. Pelatihan

Tahap selanjutnya setelah tahap observasi yaitu tahap pelatihan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, bertempat di aula Kecamatan Gegerbitung. Menjawab permasalahan yang ditemukan saat observasi, maka diputuskan untuk memberikan edukasi kepada pengelola BUMDes dan UMKM di wilayah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. Materi yang akan disampaikan berfokus pada empat aspek, meliputi 1) Penatausahaan BUMDes, 2) Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, 3) Manajemen Bisnis BUMDes, dan 4) Perencanaan Pengelolaan BUMDes. Adapun pemateri dalam setiap sesi dilakukan oleh tim PkM UMMI dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Materi dan Nama Anggota Tim PkM UMMI

Sesi	Tim PkM UMMI
Sesi 1 : Penatausahaan Pengelolaan BUMDes	1) Drs. Gatot Wahyu Nugroho, M.Ak., CA 2) Dine Meigawati, S.Sos., M.Si 3) Asril Adi Sunarto, M.Kom
Sesi 2 :	1) Elan Eriswanto, S.E.,

Pemberdayaan Pengembangan UMKM	M.M 2) Ade Sudarma, S.E., M.M 3) Sulaeman, S.E., S.Sos., M.Si
Sesi 3 : Manajemen Bisnis BUMDes	1) Nurni Arrina Lestari, S.E., M.M 2) M. Khairul Amal, S.E., M.M 3) Leonita Siwiyanti, S.Ag., M.M
Sesi 4 : Perencanaan Pengelolaan BUMDes	1) Dr. Dian Purwanti, M.AP 2) Faisal Mulia Z, S.AB., M.M 3) Hendra Tanjung, S.E., M.Ak



**Gambar 3. Pelatihan Pengelola BUMDes dan Pengelola UMKM di Kecamatan Gegerbitung**

Kecamatan Gegerbitung mempunyai luas 5.524.260 hektar (Sukabumiupdate.com, 2021) dengan Kecamatan Cirenghas sebagai batas wilayah utara, Kabupaten Cianjur sebagai batas wilayah timur, serta Kecamatan Nyalindung sebagai batas wilayah selatan dan barat (Gegerbitung, 2021). Berdasarkan hasil observasi beberapa BUMDes menjalankan usahanya belum didasarkan pada potensi wilayah yang ada, misalkan 1) BUMDes Gemah Ripah di Desa Cijurey yang memilih kegiatan usaha utamanya menjadi agen gas LPJ 3 kg untuk menjawab kebutuhan gas khususnya

masyarakat Desa Cijurey, namun belum ada perkembangan yang signifikan sejak tahun 2018 saat dipilihnya program tersebut. Hasil dari kajian usaha akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah gagasan usaha yang telah direncanakan akan diterima atau ditolak (Yuslizar, Syahrantau, 2020)

Ternyata setelah dilakukan kajian kelayakan usaha oleh tim pengabdian masyarakat, diperoleh hasil bahwa program tersebut tidak layak untuk dijalankan dilihat dari aspek keuangan yaitu kebutuhan investasi berupa kontrak dan isi ulang tabung gas relatif lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang dikumpulkan. Alhasil keuntungan yang diperoleh hanya habis untuk biaya operasional saja. Selain itu dilihat dari aspek pasar menunjukkan bahwa cakupannya hanya Desa Cijurey saja sehingga pertumbuhan permintaannya nyaris tidak ada, padahal untuk mengembalikan kontrak awal saja perlu modal sebesar Rp 60.000.000.000,00. Padahal jika dikaji dari potensi desa yang dimiliki, Desa Cijurey dengan luas 0,21 Ha tanah desa yang diperuntukkan sewa namun tidak produktif bisa untuk budidaya vanili agar komoditas ekspor vanili bisa meningkat (Sukabumizone, 2019), Selain itu Desa Cijurey juga berpotensi membuka wisata religi dan dapat bekerjasama dengan Desa Ciengang yang lebih dulu merealisasikan wisata religi sejak diresmikannya Masjid Baiturrahman pada tahun 2018 silam (Gegerbitung, 2021). BUMDes Sukamanah dan BUMDes Barokah di Desa Ciengang dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, kedua BUMDes ini dapat bekerjasama menghasilkan kreasi produk berbahan dasar jeruk (Sukabumiupdate.com, 2021). Beberapa hal tersebut termasuk

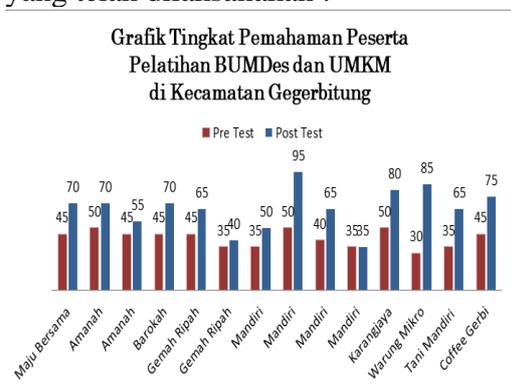
ke dalam materi pelatihan guna menambah pemahaman pengelola BUMDes bahwa usaha BUMDes berawal dari potensi desa masing-masing.

Hasil dari pelaksanaan pelatihan pengelola BUMDes dan pengelola UMKM di Kecamatan Gegerbitung dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

**Tabel 2. Analisis Deskriptif Pelatihan Pengelola BUMDes dan Pengelola UMKM di Kecamatan Gegerbitung**

<b>Jumlah Peserta</b>	14 Orang
<b>Perwakilan dari</b>	7 Desa
<b>Rata-rata Hasil Pre Test</b>	41.79
<b>Rata-rata Hasil Post Test</b>	65.71
<b>GAP Peningkatan</b>	57% (23.93)

Kegiatan pelatihan peningkatan pemahaman para pengelola BUMDes dan UMKM yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang signifikan. Terdapat 14 orang peserta kegiatan yang berasal dari 7 desa, meliputi Buniwangi, Caringin, Ciengang, Cijurey, Gegerbitung, Karangjaya, dan Sukamanah. Masing-masing berasal dari BUMDes dan UMKM, diantaranya Maju Bersama, Amanah, Barokah, Gemah Ripah, Mandiri, Karangjaya, Tani Mandiri, serta unit usaha (UMKM) yaitu Warung Mikro dan Coffee Gerbi. Berikut adalah grafik perbandingan hasil akhir dari dampak kegiatan pelatihan pada pengelola BUMDes dan UMKM di Kecamatan Gegerbitung yang telah dilaksanakan :



**Gambar 4. Grafik Tingkat Pemahaman Peserta Pelatihan BUMDes dan UMKM di Kecamatan Gegerbitung**

Dalam melaksanakan kegiatan *Pre Test* dan *Post Test*, ada 20 instrumen pertanyaan yang semuanya mewakili materi dari ke-empat bidang yang dilatihkan kepada pengelola BUMDes. Hasil *Pre Test* menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para pengelola BUMDes dan UMKM masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 41.76 dari total skala nilai 100. Pada sesi *Pre Test* ditemukan pula nilai terendah dari kegiatan ini yaitu sebesar 30 dan nilai tertinggi sebesar 50. Setelah dilaksanakan pelatihan, setiap pengelola BUMDes dan UMKM diminta kembali untuk mengisi jawaban *Post Test* yang seluruh instrumen pertanyaannya sama persis pada saat sesi *Pre Test*. Pada sesi *Post Test* ditemukan nilai terendah dari kegiatan ini yaitu sebesar 35 dan nilai tertinggi sebesar 95. Disamping itu, hasil *Post Test* rata-rata setiap peserta mencapai nilai 65,71 dari total skala nilai 100 yang jika dikonversi terdapat peningkatan pemahaman hingga mencapai 57% dari sebelum dilaksanakannya pelatihan. Jadi hasil pelatihan yang dilaksanakan oleh Tim PkM UMMI menunjukkan peningkatan pemahaman bagi para peserta secara keseluruhan, namun akan terlihat jelas dengan implementasinya di desa nya masing-masing.

### 3. Pendampingan

Tahap selanjutnya setelah tahap pelatihan yaitu tahap pendampingan. Pada tahap ini tim PkM UMMI memberikan pendampingan kepada pengelola BUMDes dan UMKM di wilayah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi selama 2 minggu yaitu pada tanggal 7-20 April 2021. Pendampingan disini berupa pemberian

solusi kepada pengelola BUMDes dan UMKM di wilayah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi terhadap pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi BUMDes atau UMKM. Permasalahan dapat disampaikan kepada tim pengabdian masyarakat melalui telepon, whatapps, atau bertemu secara langsung baik di kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi maupun di kantor BUMDes/UMKM masing-masing.



**Gambar 5. Pendampingan Pengelola BUMDes dan UMKM di Kecamatan Gegerbitung**

Tim PKM mendampingi pengurus BUMDes mengimplementasikan hasil dari pelatihan berupa penatausahaan, manajemen bisnis dan pengelolaan BUMDes masing-masing dengan benar serta membuat dokumen kerja sama dan potensi kerja sama sehingga peningkatan kemampuan para pengelola BUMDes harus terus dilakukan mengingat masih banyak sumberdaya alam dan asset desa yang belum dapat dioptimalkan, terutama dalam menaungi UMKM yang ada di setiap desa yang ada di kecamatan Gegerbitung (Tini & Yulastina, 2021).

## **SIMPULAN**

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pengelola BUMDes dan UMKM di Kecamatan Gegerbitung. Rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan,

pada umumnya para pengelola BUMDes dan UMKM belum memiliki pemahaman yang utuh terkait berbagai bidang yang berkenaan langsung dengan BUMDes dan UMKM itu sendiri. Hal tersebut menjadi penghambat utama berkembangnya BUMDes dan UMKM.

Pada tahap observasi tidak ditemukan kendala berarti, semua pihak terkait memberikan kontribusi. Dilanjutkan pada tahap pelatihan dengan konsep terfokus pada 4 aspek, meliputi 1) Penata Usahaan BUMDes, 2) Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, 3) Manajemen BUMDes dan 4) Perencanaan Pengelolaan BUMDes, memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan pemahaman dasar sebelum melaksanakan kegiatan di BUMDes dan UMKMnya masing-masing.

Hasil yang didapatkan setelah dilaksanakannya kegiatan pelatihan yaitu adanya peningkatan sebesar 57% pada pemahaman pengelola BUMDes dan UMKM yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Meskipun masih belum mencapai target yang maksimal, peningkatan menjadi tolak ukur bagi BUMDes dan UMKM agar bisa mengagendakan pelatihan serta pendampingan secara berkala guna tercapainya BUMDes dan UMKM yang diharapkan sesuai dengan amanat undang-undang. Sedangkan terkait aspek pendampingan, dukungan pimpinan daerah sangat diperlukan sehubungan dengan pentingnya regenerasi kepengurusan BUMDes dan UMKM yang baik di wilayah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi melalui pelatihan-pelatihan lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zuliansyah, Anas Malik, B. L. A. (2020). MEMBANGUN DESA MASA DEPAN YANG IDEAL: Kendala dan Kebutuhan Pemerintahan Desa dalam Mengimplementasikan Undang-undang Desa. *Al-Mu'awanah (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), 19–28.
- Anwar, M., Dwiningwarni, S. S., & Arisandra, M. L. (2019). Pengaruh Inovasi Organisasi Terhadap Kualitas Jasa Pelayanan Pelabuhan. In *Jurnal eBA. eprints.uwp.ac.id*.
- Basit. (2020). Dampak Covid-19 terhadap sektor pertanian.
- Fitria. (2020). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES). *Adl Islamic Economic*, 1(1), 13–28.
- Gegerbitung, K. (2021). Wisata religi.
- Hasan, S. (2020). Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 21–30.
- Karta Raharja Ucu. (2020). Eksistensi BUM Desa Selama Pandemi Covid-19.
- Khanida, M., Adinda, R., & Putri, R. (2020). Pelatihan Dan Pendampingan Pencatatan , Pelaporan Keuangan Bumdes Berbasis Akuntansi Sederhana Di Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto LATAR BELAKANG Tidak dapat kita pungkiri bahwasannya peran Usaha Kecil Mikro Menengah ( UMKM ) memiliki p. *ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 260–269.
- Pratiwi, M. B., & Novianty, I. (2020). Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 26–27.
- Sukabumiupdate.com. (2021). Petani Kopi Kecamatan Gegerbitung Bersiap, Robusta Sukabumi Bisa di Ekspor. *SUKABUMIUPDATE.Com*.
- Sukabumiupdate. (2020). DPMD Beberkan Kondisi BUMDes di Kabupaten Sukabumi. *Sukabumi Update*.
- Sukabumizone. (2019). *P R O P I L D E S A CIJUREY*. Sukabumi Zone.
- Tini, D. L. R., & Yuliastina, R. (2021). Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Administasi Bumdes Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 2(1), 66–76. <https://doi.org/10.22219/janayu.v2i1.13044>
- Yuslizar, Syahrantau, G. (2020). Pendampingan Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )... Pendampingan Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Respen Sakti Desa Kulim Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Pendampingan Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa ( BU. 2(1), 12–23.
- Zakariya, R. (2020a). Optimalisasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(3), 279–294.

Zakariya, R. (2020b). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. *Jurnal Integritas*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>